



Massa : ... Hari : ... Tanggal : ... Halaman : 4

PUSTAKA

Pelayan Masyarakat yang Terbaik

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

OLEH : Y.B. MARGANTORO



Judul buku : *Best Practices Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2002 - 2007*
Penulis : Sukirno, dan kawan-kawan
Prakata : Walikota Yogyakarta H. Herry Zudianto
Penerbit : Pemerintah Kota Yogyakarta, 2008/2009
Tebal buku : v + 71 halaman

SELAIN Pelayanan Pendidikan, *Best Practices* lain yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Penyediaan Prasarana Dasar/Infrastruktur Perkotaan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Penanggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi, dan Partisipasi Publik.

Pada tahun 2006, penghargaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta karena menjadi Juara I tingkat provinsi dalam pengembangan PHBS. Dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2004, kota ini dinyatakan sebagai Kota Sehat terbaik tingkat nasional. Ini menunjukkan keberhasilan Yogyakarta di bidang kesehatan. Permasalahan kesehatan sebelum *best practice* antara lain penduduk miskin belum mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Hal ini disebabkan basis data penduduk miskin yang belum kuat dan pendekatan sektoral untuk menentukan penduduk miskin, dan akibatnya pelayanan kesehatan yang diberikan belum seluruhnya dapat menjangkau penduduk miskin. Pemkot Yogyakarta kemudian melaksanakan *best practice* kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penduduk miskin, dan berkurangnya kasus penyakit menular dan penyalahgunaan Napza. Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam hal ini adalah jaminan kesehatan daerah untuk penduduk miskin, pengembangan pos pelayanan terpadu, pemberian makanan tambahan, program perilaku PHBS di lingkungan sekolah, mendirikan Napza Crisis Centre (NCC), penerapan ISO 2001, dan pemberian penghargaan dalam penanganan TBC. Karena program ini dianggap memberikan manfaat masyarakat maka pelaksanaan *best practice* di bidang kesehatan tetap dilanjutkan. Kebijakan menjadi masalah di banyak kota, termasuk di Yogyakarta. Berbagai kebijakan yang diterapkan, belum dapat menanggulangi kemiskinan secara optimal dan adanya kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada penduduk miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota ini dibagi dalam dua kelompok besar yakni pemenuhan kebutuhan dasar dan mendorong pengembangan ekonomi. Pemkot Yogyakarta sudah merencanakan upaya-upaya melanjutkan inovasi penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam program pendidikan dan kesehatan di Pemerintah Pusat, misalnya program jaminan kesehatan penduduk miskin dan keluarga harapan. Selain itu, meningkatkan layanan bagi keluarga miskin pemegang KMS dalam program atau kegiatan pengurangan modal usaha, perbaikan lingkungan permukiman dan pendidikan pelatihan usaha; mengimplementasikan model tersebut dalam satu wilayah kelurahan dan dilaksanakan secara komprehensif; serta meningkatkan peranan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. **Pemberdayaan masyarakat** Pelaksanaan *best practices* di bidang pemberdayaan masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu lembaga di masyarakat khususnya LPMK, RT dan RW dapat

Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut

berfungsi lebih optimal dan menjadi mitra pemerintah. Selain itu meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan pada skala komunitas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Dalam bidang prasarana dasar/ infrastruktur perkotaan, sejak 2002 dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu penerangan jalan umum (PJU), perbaikan prasarana dasar lingkungan, peningkatan kualitas rumah penduduk, penyediaan ruang terbuka publik.

Dalam *best practices* pengembangan ekonomi lokal antara lain melaksanakan pembangunan pasar induk buah dan sayur, pembangunan bursa agro Jogja, penataan pedagang kakifima (klitikan dan Sriwedani), peningkatan pelayanan pasar tradisional.

Selanjutnya *best practice* pengurangan KKN dan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan membentuk Dinas Perijinan, Citizen Charter, melakukan penandatanganan dan melaksanakan Pakta Integritas, melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat struktural, dan melakukan penilaian kinerja pada setiap pegawai.

Akhirnya untuk *best practices* partisipasi publik antara lain melakukan peningkatan komunikasi masyarakat dengan membuka Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) sejak tahun 2004, call centre, dan melakukan kunjungan kerja ke wilayah. Selain itu juga melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberian Walikota Award. ***

Y.B. Margantoro, Wartawan Harian Bemas Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005